

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan dibahas tentang teori yang akan mendasari dari penelitian ini. Pembahasan ini akan menjadi panduan dalam memahami secara mendalam untuk memecahkan permasalahan yang ada.

II.1. Latar Belakang Lahirnya Kelembagaan

Pada dekade 1980-an, pembahasan tentang institusi atau kelembagaan mulai berkembang dalam ilmu ekonomi, hal tersebut dikarenakan sudah semakin banyak ekonom yang menyadari bahwa kegagalan pembangunan ekonomi pada umumnya disebabkan oleh kegagalan institusi. Perkembangan tentang kajian peranan institusi di dalam pembangunan ekonomi tersebut melahirkan suatu cabang baru ilmu ekonomi yang dikenal dengan ilmu ekonomi kelembagaan (*institutional economics*). Ekonomi kelembagaan ini menekankan analisisnya pada pengaruh biaya transaksi (*transaction costs*).

II.1.1. Pengertian Institusi atau Kelembagaan

Menurut North (1991) dalam Arsyad (2010), institusi atau kelembagaan adalah aturan – aturan (*constraints*) yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial dan ekonomi. Aturan – aturan tersebut terdiri dari aturan – aturan formal (misalnya: peraturan – peraturan, undang – undang, konstitusi) dan aturan – aturan informal (misalnya: norma sosial, konvensi, adat istiadat, sistem nilai) serta proses penegakan aturan tersebut

(*enforcement*). Secara bersama – sama aturan – aturan tersebut menentukan struktur insentif bagi masyarakat, khususnya perekonomian. Aturan – aturan tersebut diciptakan manusia untuk membuat tatanan (*order*) yang baik dan mengurangi ketidakpastian (*uncertainty*) di dalam proses pertukaran.

Sementara itu, Wiliamson (2000) merinci lagi institusi sebagai aturan main ke dalam empat tingkatan institusi berdasarkan analisis sosial, yakni:

1. Tingkatan pertama adalah tingkatan lekat sosial (*social embeddedness*) dimana institusi telah melekat (*embeddedness*) dalam waktu yang sangat lama di dalam masyarakat dan telah menjadi pedoman masyarakat dalam hidup dan berkehidupan. Tingkatan ini sering juga disebut sebagai institusi informal, misalnya: adat, tradisi, norma dan agama. Agama sangat berperan penting pada tingkatan ini. Institusi pada tingkatan ini berubah sangat lambat antara satu abad sampai satu milenium. Lambatnya perubahan institusi pada tingkatan ini karena institusi ini dapat diterima dan diakui oleh masyarakatnya antara lain: institusi tersebut bersifat fungsional (seperti konvensi), dianggap sebagai nilai simbolis bagi penganutnya dan seringkali institusi tersebut bersifat komplementer dengan institusi formal yang ada.
2. Tingkatan kedua disebut dengan lingkungan kelembagaan (*institutional environment*) yang sering juga disebut sebagai aturan main formal. Institusi pada tingkatan ini berkaitan dengan aturan hukum (khususnya hak kepemilikan), konstitusi, peraturan perundang – undangan, lembaga – lembaga yudikatif dan birokrasi. Institusi pada tingkatan ini diharapkan

akan menciptakan aturan main formal yang baik (*first-order economizing*). Alat rancangan pada tingkatan kedua ini mencakup fungsi – fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif dan fungsi birokrasi dari pemerintahan serta distribusi kekuasaan antara berbagai tingkat pemerintahan. Pengertian dan pelaksanaan hak kepemilikan dan hukum kontrak merupakan hal utama pada tingkatan kedua ini. Sistem perusahaan swasta (*private-enterprise*) tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya hak kepemilikan akan sumber daya. Adanya hak kepemilikan akan memaksa orang yang ingin menggunakan sumber daya tersebut untuk membayar kepada pemiliknya. Setelah hak kepemilikan ditetapkan dan dilaksanakan, pemerintah menjaga (melalui regulasi) agar sumber daya digunakan pada tingkat penggunaan yang terbaik.

3. Tingkatan ketiga yaitu tentang tata kelola (*governance*) yang baik agar biaya transaksi (*transaction costs*) dapat diminimumkan. Hal ini dapat dilakukan dengan pembuatan, pengaturan dan penegakan sistem kontrak dengan baik. Sistem tata kelola ini bertujuan untuk menciptakan tatanan (*order*) yang baik agar dapat mengurangi konflik dan menghasilkan manfaat bersama (*mutual gains*). Tujuan institusi pada tingkatan ini adalah menciptakan tata kelola yang baik (*second-order economizing*).
4. Tingkatan keempat adalah institusi yang mengatur alokasi sumber daya dan pengerjaan (*employment*). Institusi ini mengatur hubungan prinsipal dan agen atau lebih dikenal dengan teori keagenan (*agency theory*).

Hubungan ini akan berjalan efisien jika ada sistem insentif (*reward and punishment*) diantara mereka dirancang dengan baik.

II.1.2. Perbedaan Pengertian Antara Institusi dan Organisasi

Menurut North, institusi adalah aturan main (*rules of the game*) sedangkan organisasi adalah pemainnya (*the players*). Aturan main tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Aturan – aturan informal. Misalnya: adat istiadat, tradisi, perbuatan yang dianggap tabu dan tingkah laku dalam masyarakat, dimana kesemua hal tersebut merupakan aturan tak tertulis yang sudah tertanam dan telah berlangsung dalam masyarakat secara turun - temurun. Pelanggaran atas aturan – aturan informal akan dikenakan sanksi sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.
2. Aturan – aturan formal. Misalnya sistem konstitusi, hukum dan hak kepemilikan (*property rights*), dimana kesemua hal tersebut telah diatur dalam aturan perundang – undangan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka menjaga tatanan (*order*) dalam masyarakat. Pelanggaran atas aturan – aturan formal akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

II.1.3. Manfaat dan Fungsi Kelembagaan

Institusi dibangun manusia untuk menciptakan tatanan yang baik (*order*) dan mengurangi ketidakpastian (*uncertainty*) di dalam kehidupan masyarakat. Institusi

merupakan landasan bagi keberadaan suatu masyarakat yang beradab. Tanpa adanya institusi, tidak akan pernah ada masyarakat, yang ada hanyalah sekelompok “binatang – binatang yang berakal” yang senantiasa akan berusaha untuk memenuhi tuntutan hasratnya yang kadang tidak terbatas, sehingga kerusuhan, penjarahan dan kriminalitas menjadi sebuah hal yang biasa.

Selama ini para ekonom neoklasik (konvensional) menafikkan peran institusi, mereka memandang bahwa sistem mekanisme pasar merupakan penggerak roda perekonomian yang terbaik. Menurut Veblen, sebuah institusi dan lingkungan sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan pola perilaku ekonomi masyarakat. Struktur politik dan sosial yang tidak mendukung akan menyebabkan timbulnya distorsi dalam setiap proses ekonomi. Menurut North, peran institusi formal maupun institusi informal sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Tanpa adanya institusi yang baik, biaya transaksi (*transaction costs*) dalam setiap kegiatan ekonomi akan menjadi lebih tinggi. Kehadiran institusi sangat penting sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan para pelaku ekonomi di dalam pasar. Institusi yang baik akan mampu menciptakan persaingan yang adil dan dinamis. Menurut North, institusi sangat menentukan kemajuan ekonomi suatu bangsa. Institusi tersebut mencakup tradisi sosial, budaya, politik, hukum dan ideologi. Peran institusi sangat sentral dalam pembangunan ekonomi.

Menurut Rodrik (2003) dalam Arsyad (2010), ada empat fungsi institusi dalam kaitannya dengan mendukung kinerja perekonomian, yaitu:

1. Menciptakan pasar (*market creating*) yaitu institusi yang melindungi hak kepemilikan dan menjamin pelaksanaan kontrak.

2. Mengatur pasar (*market regulating*) yaitu institusi yang bertugas mengatasi kegagalan pasar yakni institusi yang mengatur masalah eksternalitas, skala ekonomi (*economies of scale*) dan ketidaksempurnaan informasi untuk menurunkan biaya transaksi (misalnya: lembaga – lembaga yang mengatur telekomunikasi, transportasi dan jasa – jasa keuangan).
3. Menjaga stabilitas (*market stabilizing*) yaitu institusi yang menjaga agar tingkat inflasi rendah, meminimumkan ketidakstabilan makroekonomi dan mengendalikan krisis keuangan (misalnya: bank sentral, sistem devisa, otoritas moneter dan fiskal).
4. Melegitimasi pasar (*market legitimizing*) yaitu institusi yang memberikan perlindungan sosial dan asuransi, termasuk mengatur redistribusi dan mengelola konflik (misalnya: sistem pensiun, asuransi untuk pengangguran dan dana – dana sosial lainnya).

Negara – negara dengan institusi yang baik lebih mampu mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, sehingga perekonomiannya bisa bekerja lebih baik. Institusi yang kuat juga akan melahirkan kebijakan ekonomi yang tepat dan kredibel, sehingga berbagai bentuk kegagalan pasar bisa teratasi. Sebaliknya, institusi yang buruk hanya akan menjadi sebuah beban yang akan senantiasa menghalangi perekonomian untuk bisa bekerja dengan baik. Kebijakan yang dilahirkan oleh sebuah institusi yang buruk juga berpotensi besar mengalami kegagalan di tataran kebijakan (*policy failure*). Hal tersebut tentu saja akan semakin memperburuk kerugian yang ditimbulkan oleh adanya kegagalan pasar.

II.1.4. Karakteristik Institusi yang Baik dan Perubahan Institusi

Menurut Acemoglu (2005) dalam Arsyad (2010), karakteristik institusi yang baik adalah sebagai berikut:

1. Menjaga hak kepemilikan (*property rights*) untuk segenap masyarakat sehingga setiap individu memiliki insentif untuk melakukan investasi dan ambil bagian di dalam kegiatan perekonomian.
2. Membatasi tindakan para kelompok elite, politisi dan kelompok – kelompok kuat lainnya sehingga orang tersebut tidak bisa merampas sumber pendapatan dan investasi orang lain atau menciptakan kesempatan yang tidak sama bagi semua orang.
3. Meberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat sehingga setiap individu dapat melakukan investasi, khususnya dalam modal insani dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif.

Seiring dengan terjadinya proses transformasi ekonomi, sosial dan politik dalam suatu masyarakat yang menyebabkan berkembangnya kebutuhan dan keragaman manusia, institusi pun mengalami perubahan. Secara rinci, North (1990) dalam Arsyad (2010) mengungkapkan lima penyebab perubahan institusi tersebut, yaitu:

1. Adanya interaksi yang terus menerus antara institusi dengan organisasi dalam kondisi kelangkaan secara ekonomis sehingga menimbulkan persaingan merupakan faktor kunci bagi perubahan institusi. Institusi adalah aturan main baik formal maupun informal, yang secara bersama – sama menentukan cara bermain. Organisasi adalah pemainnya (*players*).

Organisasi terbentuk dari kelompok individu yang mempunyai tujuan yang sama. Organisasi – organisasi ekonomi terdiri dari, misalnya: perusahaan – perusahaan, asosiasi – asosiasi perdagangan dan koperasi. Tujuan antara dari organisasi bisa saja memaksimalkan laba (bagi perusahaan) atau memperbaiki sistem pemilihan umum (untuk partai politik), tetapi tujuan akhir dari sebuah organisasi adalah bertahan hidup (survival) karena semua organisasi hidup dalam dunia yang penuh kelangkaan dan persaingan.

2. Adanya persaingan yang disebutkan di muka akan mendorong organisasi – organisasi untuk secara terus menerus berinvestasi di bidang penciptaan keahlian dan pengetahuan baru agar tetap bisa bertahan hidup. Jenis keahlian dan pengetahuan individual serta organisasinya akan membentuk persepsi tentang peluang – peluang dan pilihan – pilihan dan secara perlahan akan mengubah institusi.
3. Adanya kerangka institusional yang menciptakan sistem insentif yang mempengaruhi lahirnya keahlian dan pengetahuan yang dianggap menghasilkan hasil yang optimal. Arah dari investasi untuk pengembangan keterampilan dan pengetahuan mencerminkan struktur insentif. Misalnya, jika ada tingkat kembalian hasil yang tinggi untuk kegiatan produktif tertentu maka dapat diharapkan bahwa organisasi – organisasi akan menginvestasikan dananya untuk peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang akan meningkatkan produktivitas di kegiatan produktif tersebut.

4. Adanya persepsi yang dibangun dari sikap mental para pelaku ekonomi. Faktor utama yang mempengaruhi pilihan seorang individu akan suatu hal dipengaruhi oleh persepsi individu tentang kemungkinan hasil dari pilihan tersebut. Persepsi itu sendiri dibentuk oleh cara ataupun sikap dari setiap individu dalam menginterpretasikan setiap informasi yang mereka peroleh. Cara atau sikap tersebut tentu saja dibentuk oleh kebiasaan, budaya dan tata nilai yang dianut oleh individu tersebut.
5. Adanya cakupan ekonomi (*economies of scope*), komplementaritas, dan eksternalitas jejaring dari suatu matriks institusional membuat perubahan institusional cukup besar dan *path dependence*. Dalam setiap aktivitasnya, setiap individu selalu berinteraksi dengan individu lainnya dan kemudian mereka membuat semacam jejaring (*networking*) di antara mereka. Adanya perubahan pola perilaku pada satu individu dalam jejaring tersebut tentu saja akan mempengaruhi perubahan pola perilaku jejaring secara keseluruhan, karena adanya sifat saling terkait (*complement*) di antara mereka. Pada akhirnya perubahan tersebut akan membawa pengaruh yang cukup besar pada perubahan institusi.

II.1.5. Perkembangan Ekonomi Kelembagaan

Ekonomi Kelembagaan (*Institutional Economics*) adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pengaruh dan peranan institusi formal dan informal terhadap kinerja ekonomi, baik pada tataran makro maupun tataran mikro. Dalam perkembangannya, terdapat dua macam Ekonomi Kelembagaan yakni

Ekonomi Kelembagaan Lama (*Old Institutional Economics*) dan Ekonomi Kelembagaan Baru (*New Institutional Economics*).

Ekonomi Kelembagaan Lama muncul pada awal abad ke-20. Menurut Rutherford (1994) dalam Arsyad (2010), Ekonomi Kelembagaan Lama ini dibangun dan berkembang di kawasan Amerika Utara, para tokohnya antara lain: Veblen, Commons, Mitchell dan Clarence Ayres. Ekonomi Kelembagaan Lama ini muncul sebagai kritik terhadap aliran neoklasik. Para tokoh Ekonomi Kelembagaan Lama mengkritik keras aliran neoklasik karena:

1. Neoklasik mengabaikan institusi dan oleh karena itu mengabaikan relevansi dan arti penting dari kendala – kendala non anggaran (*nonbudgetary constraints*).
2. Penekanan yang berlebihan kepada rasionalitas pengambilan keputusan (*rational-maximizing self-seeking behaviour of individuals*).
3. Konsentrasi yang berlebihan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) serta bersifat statis.
4. Penolakan neoklasik terhadap preferensi yang dapat berubah atau perilaku adalah pengulangan atau kebiasaan (Nabli&Nugent, 1989 dalam Arsyad, 2010).

Sementara itu, Ekonomi Kelembagaan Baru mencoba untuk menawarkan ekonomi lengkap dengan teori dan institusinya (Nabli&Nugent, 1989 dalam Arsyad, 2010). Ekonomi Kelembagaan Baru menekankan pentingnya institusi, tetapi masih menggunakan landasan analisis ekonomi neoklasik. Beberapa asumsi ekonomi neoklasik masih digunakan, tetapi asumsi tentang rasionalitas dan

adanya informasi sempurna (sehingga tidak ada biaya transaksi) ditentang oleh Ekonomi Kelembagaan Baru. Menurut Ekonomi Kelembagaan Baru, institusi digunakan sebagai pendorong bekerjanya sistem pasar.

Arti penting dari Ekonomi Kelembagaan Baru adalah:

1. Ekonomi Kelembagaan Baru merupakan seperangkat teori yang dibangun di atas landasan ekonomi neoklasik, tetapi Ekonomi Kelembagaan Baru mampu menjawab bahkan mengungkapkan permasalahan yang selama ini tidak mampu dijawab oleh ekonomi neoklasik. salah satu permasalahan tersebut adalah eksistensi sebuah perusahaan sebagai sebuah organisasi administratif dan keuangan. Ekonomi Kelembagaan Baru merupakan sebuah paradigma baru di dalam mempelajari, memahami, mengkaji atau bahkan menelaah ilmu ekonomi.
2. Ekonomi Kelembagaan Baru begitu penting dan bermakna di dalam konteks kebijakan ekonomi sejak dekade 1990-an, karena Ekonomi Kelembagaan Baru berhasil mematahkan dominasi superioritas mekanisme pasar. Ekonomi Kelembagaan Baru telah memposisikan dirinya sebagai pembangun teori kelembagaan non-pasar (*non-market institutions*). Ekonomi Kelembagaan Baru telah mengeksplorasi faktor – faktor non-ekonomi, seperti hak kepemilikan, hukum kontrak dan lain sebagainya sebagai satu jalan untuk mengatasi kegagalan pasar (*market failure*). Menurut Ekonomi Kelembagaan Baru, adanya informasi yang tidak sempurna, eksternalitas dan fenomena *free-riders* di dalam barang –

barang publik dinilai sebagai sumber utama kegagalan pasar, sehingga kehadiran institusi non-pasar mutlak diperlukan.

3. Ketika studi – studi pembangunan memerlukan satu landasan teoritis, Ekonomi Kelembagaan Baru mampu memberikan solusinya.

II.1.6. Hubungan Kelembagaan dengan Biaya Transaksi dan Informasi

Sebuah institusi muncul dan berkembang untuk meminimumkan biaya transaksi sehingga dapat meningkatkan kinerja perekonomian. Biaya transaksi tersebut antara lain berwujud biaya atas informasi, negosiasi, pengawasan, koordinasi dan pelaksanaan kontrak. Jika biaya transaksi berada pada tingkat minimal, hak kepemilikan (*property rights*) tidak menjadi bagian penting dalam konsep umum efisiensi, karena hak kepemilikan dapat disesuaikan dan diubah secara sukarela guna mendorong kenaikan proses produksi.

Menurut North dan Wallis (1994) dalam Yustika (2008), dalam kerangka relasi antara perubahan teknis dan kelembagaan, maka biaya transaksi adalah ongkos untuk lahan, tenaga kerja, kapital dan keterampilan kewirausahaan yang diperlukan untuk mentransfer hak – hak kepemilikan (*property rights*) dari satu atau kelompok orang ke pihak yang lain. Biaya transaksi muncul karena adanya transfer kepemilikan atau hak – hak kepemilikan. Jika diperluas dengan memasukkan biaya perlindungan terhadap hak – hak kepemilikan, maka Mburu dan Birner menganggap biaya transaksi sebagai ongkos yang muncul dari penciptaan dan implementasi kesepakatan kelembagaan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan biaya transaksi adalah biaya atas lahan,

tenaga kerja, kapital dan keterampilan kewirausahaan yang diperlukan untuk memindahkan (*transfer*) fisik menjadi output (Mburu, 2002 dalam Yustika, 2008).

Menurut North (1990) dalam Yustika (2008), asumsi adanya informasi sempurna dan pertukaran tanpa biaya yang dibuat oleh model pasar persaingan sempurna tidaklah tepat. North melihat adanya biaya transaksi dalam pertukaran akibat adanya informasi yang tidak sempurna. North menyatakan bahwa biaya mencari informasi merupakan kunci dari biaya transaksi yang terdiri dari biaya untuk mengerjakan pengukuran kelengkapan – kelengkapan yang dipertukarkan dan ongkos – ongkos untuk melindungi hak kepemilikan dan mengakkan kesepakatan.

Besaran biaya transaksi juga bisa terjadi karena adanya penyimpangan dalam wujud:

1. Penyimpangan atas lemahnya jaminan hak kepemilikan.
2. Penyimpangan pengukuran atas tugas yang kompleks dan prinsip yang beragam.
3. Penyimpangan intertemporal, yang dapat berbentuk kontrak yang timpang, responsivitas waktu yang nyata, ketersembunyian informasi yang panjang dan penyalahgunaan strategis.
4. Penyimpangan yang muncul karena kelemahan dalam kebijakan kelembagaan yang berhubungan dengan pembangunan dan reformasi ekonomi.

5. Kelemahan integritas yang dirujuk oleh James Wilson (1989) sebagai *sovereign transactions*. Jadi akar dari permasalahan ini adalah informasi yang kurang sempurna.

Williamson (1981) dalam Yustika (2008) mengompilasi tiga sifat utama dari transaksi, yaitu:

1. Derajat ketidakpastian inklusif dalam setiap transaksi. Misalnya, produksi pertanian berisiko karena variabilitas iklim, masalah – masalah penyakit dan hama. Pemasaran hasil tanaman menghadapi ketidakpastian karena fluktuasi harga yang disebabkan oleh perubahan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), baik untuk tanaman pengganti dan tanaman pelengkap.
2. Frekuensi transaksi. Transaksi pertanian cenderung bersifat musiman. Jumlah penjualan produksi yang dilakukan oleh pemilik lahan kecil dalam suatu musim akan tergantung pada kapasitas penyimpanan dalam pertanian. Pedagang yang bersepakat dengan hasil tanaman yang sejenis di daerah yang sama, akan banyak melakukan pembelian pada musim yang sama. Tentu saja hal ini berpotensi memudahkan untuk menanggung biaya arbitrase apabila terdapat kasus perselisihan ketika terjadi transaksi dalam jumlah besar dan tidak sering (*infrequent*), sehingga diantara pihak – pihak yang bertransaksi juga akan berupaya membangun informasi untuk kepentingan semua pihak.
3. Sejauh mana aspek ini melibatkan satu atau kedua pihak yang melakukan kontrak dalam investasi aset – aset spesifik. Aset spesifik adalah aset

manusia dan fisik dimana investasi tidak dapat digunakan selain seperti yang direncanakan sejak awal.

Terdapat empat determinan penting dari biaya transaksi sebagai unit analisis:

1. Apa yang disebut sebagai atribut perilaku yang melekat pada setiap pelaku ekonomi (*behavioral attributes of actors*) yaitu rasionalitas terbatas/terikat (*bounded rationality*) dan oportunisme (*opportunism*).
2. Sifat yang berkenaan dengan atribut dari transaksi (*attributes of the transaction*) yaitu spesifisitas aset (*asset specificity*), ketidakpastian (*uncertainty*) dan frekuensi (*frequency*).
3. Hal – hal yang berkaitan dengan struktur tata kelola kegiatan ekonomi (*governance structures*) yaitu pasar (*market*), *hybrid*, birokrasi publik (*public bureaucracy*).
4. Faktor yang berdekatan dengan aspek lingkungan kelembagaan (*institutional environment*) yaitu hukum kepemilikan, kontrak dan budaya.

Dalam praktiknya, keempat determinan tersebut bisa diturunkan menjadi variabel – variabel yang dapat menuntun setiap peneliti untuk melakukan pengukuran (*measurement*). Menurut Collins dan Fabozzi (1991) dalam Yustika (2008), formulasi biaya transaksi adalah:

$$\text{Biaya transaksi} = \text{biaya tetap} + \text{biaya variabel}$$

Pada level mikro, Strassmann (2002) mengklasifikasikan biaya transaksi dalam variabel – variabel berikut:

- Organisasi tenaga kerja dan pengguna (*organization of employees and users*).

- Mengolah informasi (*information processing*).
- Koordinasi pemasok, biaya – biaya akuisisi (*coordination of suppliers, costs of acquisition*).
- Memotivasi pelanggan (*motivating customers*).
- Mengelola distributor (*managing distributors*).
- Memuaskan pemegang saham dan peminjam (*satisfying shareholders and lenders*).
- Fee, komisi, cukai dan pajak (*fees, commissions, tolls and taxes*).
- Penelitian dan pengembangan (*research and development*).
- Biaya – biaya penjualan, umum dan administratif (*sales, general and administrative costs*) terdiri dari biaya pemasaran (*marketing*), penjual (*sales people*), manajemen (*management*), iklan (*advertising*), pelatihan (*training*) dan biaya – biaya teknologi informasi (*information technology costs*).

Secara konseptual, antara teori informasi tidak sempurna dan teori biaya transaksi sebenarnya dapat dikaitkan antara yang satu dengan yang lain, karena biaya atas informasi (*information costs*) merupakan bagian yang penting dari biaya transaksi itu sendiri. Konsep teori informasi tidak sempurna ini seringkali diterapkan dalam berbagai model utama institusi di negara – negara agraris seperti Indonesia, yang dapat dicermati dari adanya masalah – masalah seperti penyalahgunaan kredit pertanian, perilaku *moral hazard* dan adanya informasi yang asimetris. Adanya keterbatasan kapasitas dalam proses penyebaran informasi

ternyata sangat menentukan besarnya biaya transaksi di dalam pembentukan sebuah institusi.

II.1.7. Hubungan Kelembagaan dengan Modal Sosial

Modal sosial adalah sumber daya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Seperti diketahui bahwa sesuatu yang disebut sumber daya (*resources*) adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi, disimpan dan diinvestasikan. Sumber daya yang digunakan untuk investasi disebut sebagai modal. Dimensi modal sosial cukup luas dan kompleks. Modal sosial berbeda dengan istilah populer lainnya yaitu Modal Manusia (*human capital*). Pada modal manusia segala sesuatunya lebih merujuk ke dimensi individual yaitu daya dan keahlian yang dimiliki oleh seorang individu. Pada modal sosial, lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok dan antar kelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai dan kepercayaan antar sesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok. Modal sosial juga sangat dekat dengan terminologi sosial lainnya seperti yang dikenal sebagai kebajikan sosial (*social virtue*). Perbedaan keduanya terletak pada dimensi jaringan. Kebajikan sosial akan sangat kuat dan berpengaruh jika di dalamnya melekat perasaan keterikatan untuk saling berhubungan yang bersifat imbal balik dalam suatu bentuk hubungan sosial.

Inti telaah Modal Sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu entitas atau kelompok untuk bekerjasama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola

interrelasi yang imbal balik dan saling menguntungkan dan dibangun di atas kepercayaan yang ditopang oleh norma – norma dan nilai – nilai sosial yang positif dan kuat. Kekuatan tersebut akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan di atas prinsip – prinsip yang telah disebutkan.

Modal sosial juga akan memiliki pengaruh yang kuat terhadap organisasi modern bahkan terhadap kelembagaan formal dan informal. Dengan adanya modal sosial yang kuat akan mempermudah berbagai bentuk biaya transaksi. Modal sosial erat kaitannya dengan rasa saling percaya yang tinggi dan kuatnya spirit kebersamaan, apakah kebersamaan dalam organisasi maupun kebersamaan antar organisasi dengan relasi diluarnya. Modal sosial akan memperbesar tingkat koherensi tindakan berkaitan dengan stabilnya organisasi dan adanya saling pengertian bersama.

Masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat dan memiliki asosiasi – asosiasi informal yang kuat akan mampu pula mendorong kemunculan organisasi – organisasi modern yang juga kuat. Para anggota organisasi yang dibentuk akan terbiasa dengan nilai dan norma serta berhubungan dengan sesama atas prinsip – prinsip keterbukaan, etika yang tinggi dan mampu memperlebar jaringan – jaringan interaksi guna memperkuat jaringan organisasi yang dibentuk. Apapun bentuk organisasinya jika didirikan diatas pondasi masyarakat yang memiliki rasa saling percaya yang tinggi akan mendorong perkembangan organisasi tersebut dengan cepat dan positif. Sebuah institusi formal maupun informal akan kuat apabila manusia di dalamnya memiliki modal sosial yang juga kuat.

II.2. STUDI TERKAIT

Edy Juanda pada tahun 2002 melakukan penelitian tentang Peranan Lembaga Adat Keujruen Blang dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan peranan lembaga Keujruen Blang dalam menggerakkan kerja sama masyarakat tani dalam pengelolaan kegiatan pertanian sawah, mendeskripsikan kendala – kendala eksternal maupun internal dalam pengembangan lembaga Adat Keujruen Blang. Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Edy Juanda yaitu keberadaan lembaga ini sangat penting dalam kegiatan pertanian sawah. Keberadaan lembaga ini juga dapat memberdayakan masyarakat tani dalam pengelolaan pertanian sawah. Pada tahap berikutnya lembaga ini juga memberi andil bagi masyarakat tani untuk mencapai kesejahteraannya. Kendala – kendala yang dihadapi dalam pengembangan lembaga Adat Keujruen Blang adalah ketidaksiapan keujruen selaku pemimpin dalam lembaga tersebut untuk mengantisipasi perubahan – perubahan yang berasal dari dalam maupun dari lingkungan lembaga.

YB. Widodo pada tahun 2007 melakukan penelitian tentang Peranan dan Fungsi Lembaga Dalam Pemberdayaan Petani Perkebunan Kopi di Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peranan lembaga ekonomi terhadap kinerja petani perkebunan kopi di Kediri, Jawa Timur. Metode dari penelitian ini adalah analisis deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu

keberadaan lembaga ekonomi berpengaruh besar terhadap kinerja petani perkebunan kopi di Kediri, Jawa Timur, hal tersebut dilihat dari meningkatnya hasil produksi kopi.

Syafril Kemala pada tahun 2004 melakukan penelitian mengenai peranan kelembagaan koperasi unit desa (KUD) dalam tataniaga cengkeh di Sulawesi Tengah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mempelajari peran kelembagaan KUD serta mengidentifikasi faktor – faktor penyebab tidak dapat berperannya KUD dalam tataniaga cengkeh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tabulasi untuk melihat peran/aktivitas KUD dalam tataniaga cengkeh. Sedangkan untuk mempelajari faktor – faktor yang mempengaruhi peran KUD tersebut dilakukan analisis statistik dengan menggunakan model Linear Probability Model. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan, peran KUD dalam tataniaga cengkeh di Sulawesi Tengah sangat kecil yaitu sebesar 11,1 persen petani yang menjual langsung ke KUD, serta tidak ada satupun petani yang menjual seluruh hasilnya ke KUD. Faktor – faktor yang mempengaruhi petani tidak bersedia menjual hasil pertaniannya ke KUD dikarenakan KUD membeli hasil pertanian dengan harga yang rendah, cara pembayaran tidak tunai, serta volume penjualan cengkeh petani kecil. Bila KUD dapat meningkatkan harga Rp 100/kg , maka KUD mempunyai peluang meningkatkan pembelian 4 persen, serta dengan cara pembayaran tunai, maka KUD mempunyai peluang 68,87 persen untuk dapat menyerap pembelian cengkeh.